

# HASIL PEMANTAUAN KAPAL PERIKANAN MENGUNAKAN (VMS) *Vessel Monitoring System* DI PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) JAKARTA

Oleh:  
Akbar Ilham Kurniawan

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang menaungi luas perairan 3,1 juta m<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 m. Sebagai negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang sangat besar, tata kelola dalam perikanan menjadi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Ada beberapa di antaranya dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan permasalahan yang ada, termasuk adanya *illegal fishing*. Penangkapan ikan secara *ilegal* sering terjadi di wilayah penangkapan ikan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menangani penangkapan ikan dengan kapal terhadap perikanan luar beberapa negara tetangga (*Neighboring countries*) oleh kapal-kapal ikan asing (KIA). Tujuan dari kegiatan ini mengetahui jumlah pelanggaran kapal, jenis pelanggaran kapal dan alasan pelanggaran kapal di PSDKP Jakarta. Waktu pelaksanaan pengambilan data dimulai pada tanggal 20 februari sampai 16 juni 2023. Bertempat di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Jakarta. Metode yang digunakan dalam melakukan pengambilan data terbagi menjadi dua data yaitu dengan mengambil data primer dan data sekunder. Data primer dalam kegiatan ini adalah data yang di peroleh langsung melalui observasi lapang dan dokumentasi di PSDKP Jakarta. Adapun data sekunder yang didapat yakni, data excel pelanggaran kapal di PSDKP Jakarta tahun 2023. Hasil yang didapat yaitu jumlah kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran yaitu sebanyak 83 kapal, jenis surat peringatan akibat pelanggaran yang diterbitkan yaitu surat peringatan (SP) 1, dan alasan pelanggaran kapal yaitu luasnya wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan *locus delicti illegal fishing* juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya *illegal fishing*.

Kata Kunci : *PSDKP, Pelanggaran Kapal, Surat Peringatan.*